



Implementasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM): Studi Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Oktavianus Nuwa^{1*}, William Djani², David Wilfrid Rihi³, Delila Anggelina Nahak Seran⁴

¹⁻⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85001, Indonesia

oktavianusnuwa19@gmail.com^{1*}, william.djani@staf.undana.ac.id², david.rihi@staf.undana.ac.id³, delila.seran@staf.undana.ac.id⁴

Korespondensi Penulis: oktavianusnuwa19@gmail.com*

Abstract This research aims to analyze and explain the implementation of the social inclusion-based library transformation policy at Provinsi Nusa Tenggara Timur Archives and Libraries Office. This research uses a qualitative method with a case study research type and data collection procedures using in-depth interviews. The research findings show that the implementation of the Social Inclusion-Based Library Transformation (SIBLT) policy at the Office of Archives and Libraries of Provinsi Nusa Tenggara Timur has not been carried out massively. This is due to various factors, such as limited resources, including budget, time, human resources, and facilities and infrastructure; miscommunication between related organizations that have the authority to implement SIBLT; poor characteristics of the implementing agency, limited competence and number of staff, inconsistent level of hierarchical control, and poor formal and informal relationships between agencies; economic, social, and political factors, where economic resources are limited, community involvement is quite low, and support from the provincial government is inconsistent; implementing disposition issues, where SIBLT policy implementing actors do not have sufficient understanding of the program in question, and program implementing staff do not have sufficient intensity in implementing the SIBLT program.

Keywords : Policy Implementation, Library Transformation, Social Inclusion

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan terkait implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum dilakukan secara masif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, baik anggaran, waktu, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana; miskomunikasi antara organisasi terkait yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan TPBIS; karakteristik badan pelaksana yang kurang baik, kompetensi dan jumlah staf cukup terbatas, tingkat kontrol hirarkis kurang konsisten, dan hubungan formal dan informal antar lembaga kurang baik; faktor ekonomi, sosial, dan politik, di mana sumber daya ekonomi yang terbatas, keterlibatan masyarakat yang cukup rendah, dan dukungan pemerintah daerah provinsi yang kurang konsisten; masalah disposisi pelaksana, di mana aktor pelaksana kebijakan TPBIS tidak memiliki pemahaman yang cukup terkait program yang dimaksud, staf pelaksana program tidak memiliki intensitas yang cukup dalam menjalankan program TPBIS.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Transformasi Perpustakaan, Inklusi Sosial

1. PENDAHULUAN

Strategi inklusi sosial didasarkan pada pendekatan humanistik, yang juga dikenal sebagai pendekatan sistem sosial. Pendekatan inklusif memandang perpustakaan sebagai subsistem dari sistem sosial dalam sistem kesadaran kelompok. Oleh karena itu, perpustakaan

harus dipastikan memiliki tingkat kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat. Dengan bantuan perpustakaan inklusif, masyarakat umum sekarang memiliki sarana untuk menerapkan solusi untuk meningkatkan standar hidup dan kohesi sosial (Haryanti, 2019). Kondisi demikian, partisipasi masyarakat merupakan dimensi yang penting dalam transformasi perpustakaan. Keterlibatan masyarakat mengacu pada kegiatan membangun kepercayaan antara semua tingkat pemerintahan dan konstituen mereka (Jewett et al., 2021).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, dikatakan bahwa perpustakaan umum memperhatikan seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu sehingga konsep inklusi sosial sangat erat kaitannya dengan perpustakaan. Terkait dengan hal ini, inklusi sosial dipandang sebagai suatu proses meningkatkan martabat manusia dan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi atau berperan dengan baik dalam masyarakat (Mahdi et al., 2020).

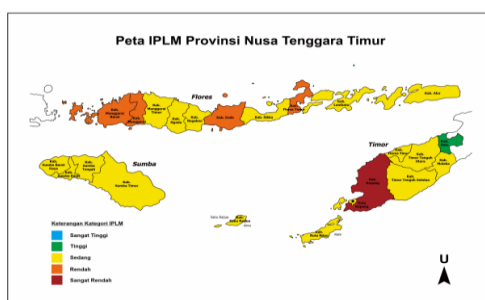
Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial saat ini sedang diimplementasikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa tujuan ditetapkan Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini adalah : (1) meningkatkan sinergitas program/ kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan perpustakaan dengan para pemangku kepentingan; (2) meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan pemecahan masalah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat; dan (3) peningkatan kualitas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pusat informasi pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan pelayanan yang relevan.

Kendati demikian, tujuan strategis dalam implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut belum tercapai secara optimal. Hal ini dijelaskan dalam dokumen laporan akhir kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023, bahwa pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam upaya peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami berbagai persoalan diantaranya : (1) NTT merupakan Provinsi kepulauan yang berdampak pada akses pelayanan; (2) ketersediaan layanan internet yang belum merata di Provinsi Nusa Tenggara Timur; (3) kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan (gedung layanan, mobil/motor perpustakaan keliling, bahan pustaka yang belum sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat); (4) terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (tenaga perpustakaan

dan pustakawan); (5) layanan perpustakaan keliling (MPK) belum menjangkau ke seluruh wilayah karena keterbatasan biaya operasional kendaraan; (6) terbatasnya koleksi bahan pustaka pada taman baca, perpustakaan rumah ibadah dan perpustakaan desa/kelurahan; (7) terbatasnya koleksi buku pengayaan/umum pada perpustakaan sekolah; (8) belum tersediannya tenaga pengelola perpustakaan sekolah yang berkompeten karena masih merangkap sebagai guru pengajar; (9) tenaga pengelola perpustakaan di desa/kelurahan adalah tenaga sukarela.

Lebih lanjut, dalam konteks literasi, berdasarkan Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun Anggaran 2023, tercatat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) secara Nasional tahun 2023 sebesar 69,42 dan masuk dalam kategori sedang. Sedangkan IPLM Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 60,53 dan masuk dalam kategori sedang. Meskipun angka tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan Renstra Perpustakaan RI 2020-2024, namun IPLM masih menjadi persoalan yang terus dibenahi. Deskripsi terkait IPLM Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan dalam peta berikut.

Gambar 1. Peta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTT



Sumber : Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun Anggaran 2023 (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2023)

Peta di atas menjelaskan bahwa warna kuning menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi (IPLM) kategori sedang, warna orange menunjukkan indeks pembangunan literasi tergolong rendah, dan warna merah menunjukkan indeks pembangunan literasi sangat rendah. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa nilai indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) di beberapa kabupaten di provinsi NTT menduduki posisi sedang, rendah, dan sangat rendah. Nilai IPLM tersebut masih menjadi persoalan yang terus dibenahi.

Kemudian, pada aras yang lain unsur nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat dipengaruhi oleh angka kunjungan perpustakaan pada suatu daerah. Tingkat kunjungan perpustakaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tergolong rendah dan belum mencapai standar dengan angka 0,733. Hal ini akan berimplikasi terhadap nilai Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Aspek lain yang perlu di lihat bahwa kondisi perpustakaan dan masyarakat yang dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu : (1) Kondisi perpustakaan dan masyarakat saat ini, dimana masyarakat Indonesia yang menggunakan perpustakaan dan jasa perpustakaan masih relatif kecil, karena sebagian besar jasa pers belum memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan belum menyediakan koleksi atau informasi yang memadai; (2) Kondisi ideal masyarakat dan perpustakaan yang diharapkan, dimana masyarakat Indonesia menggunakan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat, perpustakaan menjadi wadah pengembangan kapasitas masyarakat dan tersedianya informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan (Haryanti, 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting untuk mengkaji terkait implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam hal ini implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai proses “realisasi” atau “pelaksanaan” kebijakan. Implementasi kebijakan dalam konteks kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melibatkan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan tujuan program tersebut. Dalam ranah praktis, penelitian ini akan melihat dan mengkaji terkait bagaimana proses dan langkah-langkah konkrit pelaksanaan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang melibatkan berbagai stakeholder baik implementor kebijakan maupun para birokrat garis depan yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Merujuk pada uraian permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengacu pada model Implementasi Kebijakan dari (Van Meter & Van Horn, 1975), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan harus memenuhi indikator, yaitu : (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber Daya; (3) komunikasi antar organisasi dan Penguatan Aktivitas; (4) karakteristik badan pelaksana; (5) kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan (6) disposisi pelaksana.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini karena pendekatan yang dimaksud dapat digunakan untuk menganalisis sebuah fenomena secara langsung (Cresswell, 2013). Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi lapangan (Saleh, 2017). Adapun fokus penelitian yaitu menganalisis dan menjelaskan implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dengan mengacu pada teori (Van Meter & Van Horn, 1975), dengan indikator : : (1) standar dan tujuan kebijakan, (2)

sumber Daya; (3) komunikasi antar organisasi dan Penguatan Aktivitas; (4) karakteristik badan pelaksana; (5) kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan (6) disposisi pelaksana.

Informan dalam penelitian ini adalah elemen pemerintah dan masyarakat yang berkepentingan dalam kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Adapun informan yang dimaksud adalah : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Layanan, Kerjasama, dan Pembinaan Perpustakaan, Master trainer dan TIM Pelaksana program TPBIS, Pengunjung Perpustakaan, Bukan Pengunjung Perpustakaan.

Adapun teknik pengolahan data adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang melibatkan tiga langkah, yaitu : *data condensation* (kondensasi data) yang merupakan proses *selecting* (pemilihan), *focusing* (pengerucutan), *simplifying* (penyederhanaan), *abstracting* (peringkasan), dan *transforming* (transformasi data) ; *data display* (penyajian data) yang merupakan uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif untuk menonjolkan penemuan baru yang muncul dalam data; dan *conclusion drawing and verification* (menarik simpulan atau verifikasi) adalah proses menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dalam rangka membuat hipotesis atau generalisasi berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian (Miles et al., 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT melibatkan tiga strategi dalam upaya mencapai keberhasilan kebijakan tersebut. Adapun strategi yang dimaksud adalah peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat, dan advokasi. Peningkatan layanan informasi dalam bentuk pengalokasian bantuan fisik (buku, komputer, rak buku, meja komputer, smart TV dan fasilitas internet) dari perpustakaan kepada desa-desa yang layak menerima manfaat program TPBIS. Lebih lanjut, kegiatan pelibatan masyarakat dalam bentuk kegiatan reparasi tas dan sepatu dari tenun ikat, pelatihan membuat kue, pelatihan tata rias, bimbel, pelatihan membuat aksesoris, pelatihan membuat puding lumut kelor, pelatihan membuat teh kelor, pelatihan membuat telur crispy, dan bentuk kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian strategi advokasi dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, elemen masyarakat, kelompok-kelompok tenun ikat, sektor swasta, dan OPD provinsi.

Untuk mengkaji lebih jauh terkait implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur,

peneliti mengacu pada teori (Van Meter & Van Horn, 1975), yang terdiri dari enam indikator, yakni : (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber Daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik badan pelaksana; (5) kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan (6) disposisi pelaksana.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Dimensi ini merujuk pada seberapa jauh standar dan tujuan kebijakan tercapai. Standar dan tujuan dapat dilihat melalui berbagai dokumen seperti peraturan program dan pedoman seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan tujuan Program TPBIS tersebut mengacu pada peraturan gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 27 tahun 2021 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa standarisasi program TPBIS ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial harus melibatkan intervensi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan integrasi dengan institusi pemerintah. Adapun pemangku kepentingan yang dimaksud adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten, Desa-desa yang termasuk dalam program TPBIS, dan berbagai elemen lainnya (pihak swasta, pegiat literasi, dan organisasi-organisasi masyarakat). Namun, melihat kondisi NTT yang berbasis pada kepulauan dan adanya kesenjangan pembangunan, maka intervensi program ini mengalami persoalan, misalnya desa-desa yang menerima manfaat TPBIS tetapi belum memiliki fasilitas listrik dan layanan internet sehingga proses melaporan aktivitas TPBIS melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dana yang tersedia, tujuan dan perhatian para pemangku kepentingan harus diintegrasikan secara efektif. Kerjasama antara semua stakeholder diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Putri, 2017).

Terkait tujuan kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa, program TPBIS ini bertujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai elemen masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi meningkat yang berujung pada terciptanya masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membangun komitmen, dan dukungan pemangku kepentingan untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023 mengatur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dengan tujuan meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, dan meningkatkan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Selain itu, (Mahdi et al., 2020), menjelaskan bahwa tujuan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk merevitalisasi fungsi perpustakaan umum di berbagai provinsi maupun di kota/kabupaten. Kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga dilakukan ke perpustakaan desa yang tergolong sebagai salah satu perpustakaan umum. Revitalisasi perpustakaan sebagai media pembelajaran masyarakat berbasis inklusi berfokus pada peningkatan kapasitas perpustakaan secara keseluruhan agar dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat, menawarkan layanan yang inovatif dengan berinteraksi dengan publik dan membentuk kelompok kerja bersama dengan organisasi lain untuk mencapai kemajuan bersama (Perpusnas, 2019).

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting, baik sebagai subjek maupun objek dari pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang memadai dan optimal sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan yang signifikan dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber Daya Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran untuk mendanai kegiatan melibatkan masyarakat dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT sangat terbatas, pengalokasian anggaran dari pemerintah daerah provinsi tidak cukup. Kondisi demikian, sehingga dinas terkait berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk meminta kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan TPBIS di dinas tersebut. Lebih lanjut, untuk kegiatan peningkatan layanan perpustakaan, diintervensi langsung oleh pemerintah pusat melalui Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Provinsi berfungsi sebagai distributor, mendistribusikan berbagai macam bentuk bantuan fisik kepada desa yang menerima manfaat TPBIS. Adapun bantuan yang dimaksud seperti buku, komputer, rak buku, meja komputer, smart TV dan fasilitas internet. Keterbatasan dana tersebut berimplikasi terhadap kualitas dan keberhasilan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Keterbatasan dana dalam implementasi kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat mempengaruhi kinerja kebijakan secara langsung dan tidak langsung. Hal ini, sebagaimana disampaikan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975), bahwa keterbatasan dana dapat menghambat pelaksanaan kebijakan karena tidak tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan merupakan faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor pelaksana kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tidak memiliki SDM yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS). Di mana para implementor kebijakan tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait pembuatan reparasi tas dan sepatu dari tenun ikat, pembuatan puding kelor, pelatihan pembuatan tata rias, dan berbagai bentuk kegiatan TPBIS lainnya. Sehingga implikasi dari hal ini, Dinas tersebut mendatangkan berbagai pihak terkait yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai bidang kegiatan TPBIS. Lebih lanjut, terkait jumlah tim kerja, temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah tim kerja program TPBIS sangat terbatas, hanya berjumlah 8 orang. Meskipun bidang layanan dan pengembangan dilibatkan saat pelaksanaan program, namun penanggung jawab utama ada pada tim kerja program TPBIS.

Terkait keterbatasan SDM dan jumlah staf pelaksana dalam implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dapat berimplikasi pada kualitas kebijakan dan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. (Van Meter & Van Horn, 1975) mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan pekerjaan yang telah ditentukan oleh kebijakan yang telah disepakati bersama merupakan hal yang sangat penting dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam menentukan tujuan dan strategi kebijakan yang harus dilakukan.

Waktu

Waktu pelaksanaan program merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keterbatasan waktu dapat menjadi masalah ketika mengimplementasikan kebijakan. Keterbatasan waktu dapat menyebabkan kebijakan tidak diimplementasikan secara efektif, yang dapat berdampak negatif terhadap proses implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan program TPBIS dimulai sejak tahun 2018 dan belum dilakukan secara masif karena berbagai faktor, seperti masalah aksesibilitas ke desa-desa, apalagi dengan kondisi provinsi NTT yang berbasis kepulauan. Kondisi demikian, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mendistribusikan bantuan TPBIS. Pada tahun 2021 program tersebut di jeda karena pandemi covid 19. Program tersebut, baru dilaksanakan secara masif sejak tahun 2022 sampai sekarang. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam upaya implementasi program ini mengalami keterbatasan waktu sehingga berimplikasi pada output yang dihasilkan dari program.

Keterbatasan waktu dalam implementasi kebijakan dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, sehingga penting untuk memperhatikan keterbatasan waktu dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif. (Van Meter & Van Horn, 1975) mengatakan bahwa Sumber daya waktu merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Manajemen waktu sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan karena dapat mempengaruhi seberapa baik kebijakan tersebut dilaksanakan. Ketika sumber daya waktu terbatas, maka implementasi dapat terhambat atau gagal.

Keterbatasan waktu dapat mempengaruhi efektivitas kampanye sosialisasi dan strategi penjangkauan, yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui dan memahami kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (Kusumadewi, 2022). Lebih lanjut, dalam sebuah penelitian dari (Ruhukail & Koerniawati, 2021) menunjukkan bahwa dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam konteks koleksi digital membutuhkan waktu untuk pengumpulan, pengelolaan, dan aksesibilitas. Keterbatasan waktu dapat mempengaruhi proses ini, terutama dalam mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam mengakses informasi terbaru.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam implementasi program merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini

penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif dengan menjalankan fase perencanaan, implementasi, dan eksekusi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup dalam menunjang kegiatan TPBIS di Dinas tersebut. Adapun keterbatasan sarana dan prasarana yang dimaksud adalah perangkat komputer dan peralatan penunjang kegiatan pelibatan masyarakat seperti kain tenun ikat, bahan dan peralatan pembuat kue, bahan dan peralatan tata rias, dan keterbatasan alat penunjang lainnya. Kondisi demikian, sehingga dinas terkait berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menunjang bahan dan peralatan kegiatan TPBIS di NTT.

Temuan penelitian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dapat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana sangat penting dalam menggerakkan implementasi kebijakan. (Van Meter & Van Horn, 1975) mengatakan bahwa penting untuk mempertimbangkan dampak fluktuasi sumber daya ketika merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, karena hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan.

Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Dimensi ini merujuk pada bagaimana bentuk komunikasi antar instansi terkait atau berbagai stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi miskomunikasi antar instansi terkait dalam upaya pelaksanaan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsistensi dan keseragaman komunikasi antar instansi terkait cukup rendah. Di mana masih terjadi miskomunikasi antar lembaga dan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan TPBIS di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Miskomunikasi terjadi karena kurangnya kerjasama antara pustakawan, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Selain itu, hal ini juga terjadi karena kurangnya komitmen dari pimpinan, dalam hal ini pimpinan yang dimaksud adalah pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten. Apalagi Perpustakaan Provinsi maupun Perpustakaan Kabupaten hanya berfungsi sebagai pemantau dan evaluasi terhadap desa yang menjalankan program yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM). Komunikasi

dalam dan antar organisasi adalah proses yang kompleks dan sulit. Dalam mentransmisikan pesan ke bawah dalam suatu organisasi, atau dari satu organisasi ke organisasi lain, komunikator mau tidak mau mendistorsi pesan tersebut baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Downs, 1967 : 133-136) dalam (Van Meter & Van Horn, 1975).

Karakteristik Badan Pelaksana

Dimensi ini merujuk pada hubungan lembaga pelaksana dengan stakeholder lainnya dalam sistem penyampaian kebijakan. Karakteristik yang mungkin mempengaruhi kapasitas organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, terdapat beberapa elemen-elemen yang perlu diperhatikan, diantaranya kompetensi dan jumlah staf, tingkat kontrol hirarkis, hubungan formal dan informal dengan badan pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi ini diketahui bahwa kompetensi dan jumlah staf cukup terbatas, tingkat kontrol hirarkis kurang konsisten, dan hubungan formal dan informal antar lembaga kurang baik dalam implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini dapat dijelaskan bahwa masalah yang ada pada dimensi tersebut dapat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Hal tersebut karena dimensi ini berkaitan dengan Struktur birokrasi digambarkan sebagai “karakteristik, normatif, dan pola hubungan yang signifikan dalam badan-badan eksekutif yang memiliki hubungan potensial atau aktual dengan hal-hal yang mereka lakukan dalam proses pengambilan kebijakan.” Ripley (1973 : 10) dalam (Van Meter & Van Horn, 1975).

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik sangat penting untuk menjalankan kebijakan publik. Kondisi yang tidak stabil dapat menghambat implementasi, sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk membuat lingkungan eksternal menjadi lebih stabil dan meningkatkan komunikasi dalam organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi politik, terdapat dukungan dari berbagai aktor kebijakan, pemerintah daerah Provinsi NTT dan berbagai stakeholder lainnya, namun cenderung tidak konsisten dalam mendukung kebijakan dan mengalokasikan dana program TPBIS. Sementara itu, kondisi ekonomi kurang mendukung dalam implementasi program ini. Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah ketersediaan layanan listrik yang belum menjangkau ke seluruh pelosok desa yang berimplikasi pada berhasil atau tidaknya program TPBIS di desa penerima program TPBIS. Hal ini karena untuk melaksanakan program TPBIS,

desa terkait harus memiliki fasilitas internet yang memadai untuk melaporkan segala bentuk kegiatan TPBIS pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang sudah disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Lebih lanjut, dalam konteks sosial, keterlibatan masyarakat cukup rendah dalam upaya implementasi program TPBIS ini. Selain itu, hubungan sosial antara dinas terkait cukup rendah. Adapun dinas yang dimaksud adalah Dinas Perpustakaan Provinsi dan Dinas Perpustakaan Kabupaten.

Temuan penelitian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa keterbatasan ekonomi, kondisi politik dan rendahnya keterlibatan masyarakat dapat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini, sebagaimana disampaikan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975), bahwa keterbatasan ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Karena Variabel ini akan menunjukkan seberapa besar kesediaan kelompok-kelompok kepentingan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan apakah elit politik mendukung pelaksanaan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Disposisi Para Pelaksana

Ada tiga elemen respon pelaksana yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan : kognisi mereka (pemahaman) terhadap kebijakan, tanggapan mereka terhadap hal tersebut (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas agen pelaksana (Van Meter & Van Horn, 1975).

Terkait arah disposisi pelaksana, temuan penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana tidak memiliki pemahaman dan intensitas yang cukup dalam upaya implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Hal tersebut, bukan karena para pelaksana menolak tujuan dari kebijakan, namun karena beragamnya kegiatan dalam program TPBIS maka implementor kebijakan perlu diberikan bimbingan teknis terkait berbagai kegiatan dalam kebijakan yang sedang diimplementasikan. Para pelaksana kebijakan mungkin gagal melaksanakan kebijakan karena mereka menolak tujuan yang terkandung didalamnya (Peltason, 1961; Dolbeare dan Hammond, 1971; Etzioni, 1961; Wasby, 1970; dan Derthick, 1970) dalam (Van Meter & Van Horn, 1975). Sebaliknya, penerimaan terhadap standar dan tujuan kebijakan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakannya, akan meningkatkan potensi keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Kaufman, 1960) dalam (Van Meter & Van Horn, 1975).

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum dilakukan secara masif. Hal tersebut karena berbagai persoalan, seperti : keterbatasan sumber daya, baik sumber daya anggaran, waktu, SDM, maupun sarana dan prasarana; adanya mis komunikasi antar lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan TPBIS, komunikasi antar Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten, dan Perpustakaan Desa; karakteristik badan pelaksana yang kurang baik, kompetensi dan jumlah staf cukup terbatas, tingkat kontrol hirarkis kurang konsisten, dan hubungan formal dan informal antar lembaga kurang baik; faktor ekonomi , sosial, dan politik, di mana sumber daya ekonomi yang terbatas, keterlibatan masyarakat yang cukup rendah, dan dukungan pemerintah daerah provinsi yang kurang konsisten; masalah disposisi pelaksana, di mana aktor pelaksana kebijakan TPBIS tidak memiliki pemahaman yang cukup terkait program yang dimaksud, staf pelaksana program tidak memiliki intensitas yang cukup dalam menjalankan program TPBIS.

DAFTAR REFERENSI

- Asfiah, S. (2012). Faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan investasi di Kabupaten Probolinggo (Doctoral dissertation).
- Cresswell, J. (2013). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches*.
- Diana. (2022). Dampak transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial terhadap kesejahteraan masyarakat (Penelitian pada Perpustakaan Desa Simpang Utama Kabupaten Bener Meriah) (Skripsi).
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). Peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Gidley, J. M., Hampson, G. P., Wheeler, L., & Bereded-Samuel, E. (2010). Social inclusion: Context, theory, and practice. *The Australasian Journal of University-Community Engagement*, 5(1), 6–36.
- Gubernur Nusa Tenggara Timur. (2021). Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- Haryanti, W. T. (2019). Perpustakaan berbasis inklusi sosial. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(2).
- Inawati, A. P., & Saefullah, R. S. (2022). Peran pustakawan dalam implementasi layanan berbasis inklusi sosial. 6, 248–259.
- Jewett, R. L., & Larsen, M. M. (2021). Social cohesion and community resilience during COVID-19 and pandemics: A rapid scoping review to inform the United Nations Research Roadmap for COVID-19 recovery. *International Journal of Health Services*, 51(3), 325-336. <https://doi.org/10.1177/0020731421997092>

- Kurniasih, R. I., & Saefullah, R. S. (2021). Inklusi sosial sebagai transformasi layanan di perpustakaan daerah Karanganyar. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 7(2), 149–160. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i2.34599>
- Kusumadewi, M. E. C. L. R. (2022). Analisis kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam membangun modal sosial masyarakat desa (Studi Kasus di Kabupaten Lebak-Banten dan Kabupaten Magelang-Jawa Tengah) (Tesis). <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20521395&lokasi=lokal>
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan kota inklusif: Asal-usul, teori, dan indikator. *Jurnal Tataloka*, 19(2), 93. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.93-103>
- Mahdi, R. (2020a). Perpustakaan umum berbasis inklusi sosial: Apa dan bagaimana penerapannya? (Sebuah kajian literatur). *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 15(2), 201. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2020.152.201-215>
- Mahdi, R. (2020b). Strengthening community economy inclusively through literacy for prosperity. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(2), 160–176. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i2.62>
- Mahdi, R., & Asari, A. (2020). Social inclusion-based library transformation: A National Library of Indonesia's role to support sustainable development goals (SDGs). *Library Philosophy and Practice* (e-Journal), 6028. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6028/>
- Miles, M. B., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Perpusnas. (2019). Peer learning meeting nasional transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, transformasi perpustakaan mengubah wajah perpustakaan umum. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. <https://www.perpusnas.go.id/berita/peer-learning-meeting-nasional-transformasi-perpustakaan-berbasis-inklusi-sosial,-transformasi-perpustakaan-mengubah-wajah-perpustakaan-umum>
- Perpusnas. (2021). Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. <https://www.perpusnas.go.id/berita/transformasi-perpustakaan-berbasis-inklusi-sosial->
- Perpusnas. (2023). Literasi jadi alat maksimalkan kualitas SDM di Indonesia. <https://www.perpusnas.go.id/berita/literasi-jadi-alat-maksimalkan-kualitas-sdm-indonesia>
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2017). Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang standar nasional perpustakaan kabupaten/kota (pp. 699).
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2023). Laporan akhir kajian indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) tahun 2023.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2(8), 132–137.
- Presiden Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, 66, 37–39.

- Purnomo. (2018). Peranan perpustakaan umum dalam gerakan literasi informasi sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat (Studi analisis pada Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY) (Tesis). <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32819>
- Putri, D. F. (2017). Analisa stakeholder dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun. Universitas Airlangga, 1–10.
- Rahman, A., & Santalia, I. (2024). Analisis program perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam meningkatkan kecakapan digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal Papyrus: Sosial*, 3(5), 1–11. <https://doi.org/10.59638/jp.v3i5.31>
- Ruhukail, C. J., & Koerniawati, T. (2021). Persepsi pustakawan terhadap transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan*, 23(2), 79–94.
- Salam, A. (2018). Pemberdayaan masyarakat berbasis kebudayaan. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 3(2), 104–106.
- Saleh, S. (2017). Analisis data kualitatif. Pustaka Ramadhan.
- Simplican, S. C., & Leahy, M. (2015). Defining social inclusion of people with intellectual and developmental disabilities: An ecological model of social networks and community participation. *Research in Developmental Disabilities*, 38, 18–29. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.10.008>
- Sudarni, A. F., & Mahdi, R. (2023). Kinerja perpustakaan dalam transformasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang. *Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(2), 218–232.
- Tanjung, D. S., & N. H. (2023). Transformation of village library to social inclusion-based library for community entrepreneurship (Case study of Rambung Sialang Hulu Village Library, Sergei District, Deli Serdang Regency). *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(3), 373–382. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1680>
- Utami, D., & Prasetyo, W. D. (2019). Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. *Visipustaka*, 21(1), 31–38.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. PT Bumi Aksara.
- Wiyono, E. (2021). Library transformation based on social inclusion in accelerated COVID-19 pandemic treatment. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 564, 192–194. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.035>